

Menelisik Pengendalian Akuntansi Pendapatan dan Pengeluaran Kas pada Usaha Mikro (Exploring Accounting Control for Cash Revenue and Disbursement in Micro Enterprises)

by 309. 2036 Nur'aini Rokhmania 309. 2036 Nur'aini Rokhmania

Submission date: 20-Jan-2020 09:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 1243833178

File name: 310._2036-5806-3-SM_artikel_masuk.doc (355K)

Word count: 5471

Character count: 35981

Menelisik Pengendalian Akuntansi Pendapatan dan Pengeluaran Kas pada Usaha Mikro (Exploring Accounting Control for Cash Revenue and Disbursement in Micro Enterprises)

^{1, 2, 3}

¹Nur'aini Rokhmania, STIE Perbanas Surabaya, Indonesia

²Nurul HU Dewi, STIE Perbanas Surabaya, Indonesia

³Pepie Diptyana, STIE Perbanas Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received

Revised

Accepted

JEL Classification:

Keywords:

Accounting procedures, Internal control, Bank, Cash transaction

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of accounting procedures and how internal control carried out in micro enterprises. The data taken from resource persons of the research which are the owners of 'LBB Surabaya' and 'Travel Surabaya' micro businesses in Surabaya, their employees, and their customers. Based on descriptive qualitative, this research concluded that 'LBB Surabaya' and 'Travel Surabaya' have maintained Cash Books. They also use bank records as their cash summaries. There is no written accounting procedure, and no reconciliation has been made. Control that has been done is good communication and trust. Nevertheless, reconciliation, transaction documentation and document archiving need to be done, as well as minimizing cash transactions to reduce fraud risk and to increase accounting data accuracy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur akuntansi yang diterapkan dan cara pengendalian internal yang dapat dilakukan oleh pengusaha mikro. Narasumber penelitian adalah pemilik usaha mikro 'LBB Surabaya' dan 'Travel Surabaya', karyawannya, dan pengguna jasa perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa catatan akuntansi yang dimaintain adalah Buku Kas yang dicocokkan dengan catatan bank. Belum ada prosedur akuntansi secara tertulis, dan belum dilakukan rekonsiliasi antara catatan kas di perusahaan dengan buku bank. Pengendalian yang telah dilakukan adalah dalam bentuk komunikasi yang baik dan nilai-nilai memegang kepercayaan. Walaupun demikian, perlu dilakukan rekonsiliasi, dokumentasi transaksi dan pengarsipan dokumen dengan baik, serta meminimumkan transaksi tunai untuk mengurangi risiko fraud dan meningkatkan akurasi data akuntansi.

1. INTRODUCTION

Sebagian besar usaha mikro, kecil dan menengah adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau berupa perusahaan keluarga. Pada perusahaan semacam itu, pengaruh pendiri perusahaan pada operasional perusahaan sangat kuat. Pengaruh pendiri yang juga pemilik terhadap operasional perusahaan pada perusahaan mikro lebih kuat daripada perusahaan kecil (Lussier & Sonfield, 2015).

Karena pengaruh yang kuat para pendiri atau pemilik perusahaan, maka pengelolaan aset

aset pribadi mereka dan aset perusahaan seringkali bercampur. Sari (2013) menemukan bahwa terdapat kecenderungan penggunaan dana perusahaan untuk kebutuhan pribadi pemilik atau pendiri, dan laba atau pendapatan perusahaan diperlakukan sebagai "dompet pemilik". Temuan itu membuktikan bahwa konsep entitas tidak diterapkan secara layak pada perusahaan mikro, kecil dan menengah.

Kurniawati, Nugroho, & Arifin (2012) menyebutkan bahwa sebagian besar usaha mikro dan kecil tidak dapat menyatakan laba usahanya secara akurat dalam angka mata uang, melainkan

* Corresponding author, email address: ¹ nuraini @perbanas.ac.id, ² Nurul@perbanas.ac.id, ³ pepie@perbanas.ac.id.

menggambarkan kesuksesan usahanya dalam bentuk wujud penambahan aset berwujud seperti motor, rumah atau mobil. Dua puluh enam (50,98%) responden menyatakan bahwa perusahaannya sudah berdiri lebih dari 10 tahun, tanpa akuntansi perusahaan tetap dapat berjalan. (Kurniawati, Nugroho, & Arifin, 2012). Putra (2019) menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan karyawan, ukuran perusahaan, lamanya perusahaan berdiri, dan tingkat pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh terhadap ketertarikan MSMEs untuk memanfaatkan aplikasi akuntansi. Artinya, pada MSMEs, praktik akuntansi yang dipersepsikan untuk menyusun laporan keuangan eksternal masih terbatas. Hal itu disebabkan oleh adanya keterlibatan penuh pemilik usaha, atau belum ada implementasi konsep entitas.

Penerapan konsep entitas pada MSMEs dan organisasi nirlaba penting untuk mengevaluasi kinerja usaha. Selama tidak ada pemisahan kekayaan antara entitas dengan kekayaan pemilik atau kekayaan pengelola, maka keberhasilan suatu usaha tampak samar. Sumber data keberhasilan usaha yang mudah tersedia adalah sejarah berkembangnya usaha yang berupa data nonfinansialnya, seperti : jumlah pelanggan, usia usaha, rata-rata omset, rata-rata ongkos produksi. Walaupun ada data nonfinansial, apabila tidak ada alur akuntansi yang dapat mendokumentasikan transaksi secara objektif, maka belum ada angka tepat yang dapat menggambarkan kemampuan finansial entitas. Campuran pemilik yang selalu siap mengucurkan dana pribadi ke dalam usaha, pinjaman pribadi yang dilakukan pemilik demi kelancaran arus kas entitasnya, sampai dengan *prive* yang dianggap sebagai pembagian keuntungan, dapat membuat kinerja keuangan entitas menjadi *blur/kabur*.

Walaupun pengusaha MSMEs berpersepsi bahwa perusahaan belum memerlukan laporan keuangan, sebenarnya MSMEs sudah melakukan prosedur akuntansi untuk kebutuhan pengambilan keputusan oleh pemilik. Berdasarkan survey terhadap 51 usaha mikro di Solo, MSMEs melakukan pencatatan untuk Kas Masuk (78,43%), Kas Keluar (78,43%), Penjualan (66,67%). Pembelian (64,7%), Persediaan (52,94%), Biaya (60,78%), dan Gaji (47,06%). Sementara itu, pelaporan akuntansi yang dibuat berupa Laporan Penjualan (66,67%). Laporan Pembelian (52,94%), Laporan Persediaan (45,10%), Laporan Gaji (41,18%). Terbatasnya

pelaksanaan akuntansi disebabkan karena pengusaha merasa bahwa akuntansi hanya dibutuhkan bagi perusahaan yang tidak dikelola sendiri oleh pemiliknya (Kurniawati, Nugroho, & Arifin, 2012). Ibarra & Velasco (2015) melakukan survey pada 470 MSMEs di Metro Manila dan Provinsi Quezon, Filipina. Mereka menyimpulkan bahwa praktik akuntansi yang umum diterapkan oleh MSMEs digambarkan dalam bentuk penentuan estimasi *bad debt*, metode depresiasi, estimasi piutang bersih yang tertagih.

Akuntansi dapat diinterpretasikan sebagai fungsi dan sebagai pengendalian/kontrol (Petro, 2016). Fungsinya adalah menyajikan informasi keuangan sesuai dengan metode dan prinsip yang berlaku umum. Penyajian informasi tersebut hanya dapat akurat jika dilakukan berdasarkan prosedur yang memastikan bahwa data yang digunakan adalah akurat. Jadi, akuntansi tidak hanya tentang metode penghitungan dan menyusun informasi, melainkan juga kualitas sumber datanya.

Akurasi data dapat ditentukan oleh dokumentasi transaksi dan kejadian. Dokumentasi akuntansi dinyatakan perlu untuk mengendalikan kas dan catatan perusahaan (Ibarra & Velasco, 2015). Responden survey Ibarra & Velasco (2015) menyatakan bahwa mereka selalu memelihara (*maintaining*) akun bank, rutin menyetorkan kas tunai ke bank setiap hari atau pada hari kerja berikutnya untuk mencegah penyalahgunaan uang tunai. Praktik pengendalian yang banyak dilakukan MSMEs selain *maintain* akun bank adalah pencatatan pengeluaran setiap hari, dan menyiapkan anggaran. Selain itu, penggunaan dokumen bisnis adalah praktik akuntansi yang signifikan pada pengendalian akurasi angka. Penggunaan komputer adalah penerapan pengendalian data yang paling sedikit digunakan MSMEs (Ibarra & Velasco, 2015; Kurniawan & Diptyana, 2011).

Penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pada perusahaan mikro, kecil dan menengah yang belum menyusun laporan keuangan sesuai SAK yang berlaku sebenarnya sudah ada upaya untuk melakukan prosedur akuntansi (Kurniawati, Nugroho, & Arifin, 2012; Ibarra & Velasco, 2015; Ningtyas, 2017). Namun penelitian mengenai bagaimana prosedur akuntansi serta praktik pengendalian data akuntansi itu dilakukan masih terbatas. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada peneliti selanjutnya dan kepada khalayak berupa gambaran tentang bagaimana prosedur akuntan-

si yang diterapkan dan cara pengendalian internal yang dapat dilakukan oleh pengusaha mikro.

2. RERANGKA TEORITIS

Teori Entitas dan Konsep Entitas

Teori dan konsep ini mengantarkan pada pemahaman tentang apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan, serta akun apa saja yang mempengaruhi keputusan para investor. Teori Entitas dicetuskan oleh Patton pada sekitar tahun 1922 (Clark, 1993). Menurut teori entitas, kreditur dan investor sama-sama menyetorkan modal berharap mendapatkan *return*; Sumber pendanaan tidak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh operasional perusahaan yang sedang berjalan. Patton berpendapat bahwa struktur modal perusahaan tidak relevan dengan kinerja perusahaan berdasarkan dua asumsi dasar, yaitu : (1) keputusan investasi dan keputusan pendanaan itu independen, serta (2) nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh tipe, atau tipe-tipe modal yang ada di dalam struktur modal. Patton berargumen bahwa sumber modal (*capital source* atau *capital sources*) tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Jika utang menjadi substitusi saham, maka kos faktor-faktor produksi akan tetap sama. Laba operasi juga tidak dipengaruhi oleh *leverage*. Akibatnya, rasio *leverage* perusahaan tidak berdampak apa-apa terhadap nilai perusahaan, sehingga rasio *leverage* dinyatakan tidak relevan sebagai informasi saat pengambilan keputusan oleh para investor. Para pendukung Teori Entitas menyatakan bahwa struktur modal yang membedakan Utang dengan Modal itu tidaklah relevan dengan keputusan investasi. Intinya kedua hal tersebut adalah Ekuitas, yang sama-sama akan menyebabkan *cost* bagi perusahaan, atau menghasilkan *return* bagi pemberinya namun tidak ada hubungannya dengan operasional perusahaan. Oleh karena itu persamaan akuntansi yang diargumenkan Patton adalah Aset = Ekuitas (Clark, 1993). Persamaan ini menggambarkan bentuk *double entry bookkeeping* (DEB).

Teori DEB dibangun berdasarkan **konsep entitas**. Konsep Entitas atau *Economic Entity Concept* menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai entitas ekonomi atau suatu usaha yang terpisah dari pemiliknya. Akibatnya, hubungan antara pemilik dengan perusahaannya diperlakukan seperti transaksi antara dua pihak yang berbeda atau terpisah. Jika tidak dipisahkan, pemilik akan kesulitan menentukan

kinerja perusahaannya, apakah perusahaan itu laba atau rugi, kesulitan arus kas atau tidak, dan sebagainya.

Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi adalah suatu proses yang menjamin keamanan data akuntansi dan tujuan akuntansi tercapai, yaitu menyajikan informasi keuangan yang berkualitas untuk pihak eksternal dan internal. Proses akuntansi berawal dari transaksi, kejadian, dan keadaan yang berimplikasi ekonomi entitas. Pencatatan berdasarkan bukti yang terverifikasi, *double entry bookkeeping*, serta langkah-langkah dalam siklus akuntansi menunjukkan bahwa akuntansi adalah proses penyajian informasi yang sistematis dan terkontrol. Petro (2016) menyimpulkan bahwa kontrol akuntansi tidak hanya dilakukan oleh auditor internal dan eksternal; melainkan pengendalian akuntansi terjadi saat mengkomparasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi data saat melakukan analisis dan mensintesis data akuntansi pada fungsi akuntansi itu sendiri.

Pengendalian akuntansi merupakan bagian dari implementasi pengendalian internal dan tidak dapat dipisahkan. Pengendalian internal adalah suatu proses yang diimplementasikan oleh entitas tertentu untuk mendapatkan jaminan yang masuk akal (*reasonable assurance*) tercapainya tujuan pengendalian dapat tercapai, yaitu : (1) melindungi aset dari penggunaan, pemindahan atau peniadaan yang tidak otorisasi terhadap aset, (2) memelihara catatan-catatan agar selalu lengkap, rinci, agar dapat menghasilkan laporan aset yang akurat dan jujur, (3) menyediakan informasi yang andal dan akurat, (4) menyiapkan laporan-laporan finansial yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan manajemen, (5) mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional, (6) mendorong ditaatinya kebijakan manajerial, (7) menjamin ketaatan operasional perusahaan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan (8) menjamin bahwa tujuan perusahaan yang ditetapkan akan tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, COSO mengembangkan lima komponen pengendalian internal yang terdiri atas (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Risk Assessment, (3) Prosedur Pengendalian, (4) Monitoring, serta (5) Informasi dan Komunikasi (Romney & Steinbart, 2018). Komponen lingkungan pengendalian mencakup adanya integritas dan nilai etis, komitmen pada kompetensi, Komite audit, struktur organisasi – organisasi – tanggungjawab, kebijakan sumber

daya manusia, filosofi & gaya manajemen.

Previous Research

Hasil penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa MSMEs banyak yang belum membuat laporan keuangan (Kurniawati, Nugroho, & Arifin, 2012; Ibarra & Velasco, 2015; Putra, 2019), penerapan Standar Akuntansi masih terbatas (Ningtyas, 2017). Hal itu dapat disebabkan karena belum ada penerapan konsep entitas (Sari, 2013; Sembiring & Elisabeth, 2018). Para pengusaha merasa bahwa laporan keuangan hanya digunakan untuk keperluan keputusan pemilik atau internal saja.

Walaupun tidak menyusun laporan keuangan secara utuh, pengusaha memiliki cara untuk mengetahui kinerja dan mempertahankan *cash flow* usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian dan pencatatan sebenarnya telah dilakukan oleh para pengusaha atau pengelola NGO. Bentuk pengendalian akuntansi yang selalu dilakukan dan paling banyak dilakukan oleh UMKM di Filipina, yaitu: mencatat transaksi belanja secara harian, menyiapkan anggaran, dan *me-maintain* akun bank (Ibarra & Velasco, 2015).

Akuntansi yang dilakukan UMKM digunakan masih sederhana, dan dilakukan sebagai bentuk pengendalian aset di UMKM. Ibarra & Velasco (2015) menjelaskan bahwa di Filipina, praktik akuntansi yang diterapkan UMKM antara lain adakag penerapan metode akuntansi (basis kas atau basis akrual), penggunaan metode melakukan estimasi dan pencatatan cadangan kerugian piutang serta menentukan nilai bersi piutang yang dapat tertagih, penerapan metode depresiasi, dokumen bisnis yang digunakan sebagai dasar pencatatan keuangan, dan pencatatan metode pembayaran (cicilan atau tunai). Sementara itu berdasarkan penelitian Kurniawati, Nugroho, & Arifin (2012) UMKM di Salatiga menerapkan akuntansi dengan cara memelihara pencatatan transaksi. Pencatatan yang paling banyak dilakukan adalah pencatatan Kas Masuk dan Kas Keluar (78,43% dari responden). Pencatatan transaksi selain Kas Masuk dan Kas Keluar juga dilakukan untuk transaksi Penjualan, Pembelian, Biaya, Persediaan. Transaksi Gaji lebih banyak yang tidak mencatat dalam pembukuan.

Indikator kinerja yang paling banyak digunakan oleh pengusaha adalah angka pendapatan dan pengeluaran. Para pengusaha MSMEs

memiliki kepercayaan bahwa usaha yang ia jalankan itu tidak merugi dan layak dipertahankan. Kepercayaan itu tentunya bukan berdasarkan intuisi saja, melainkan mereka juga memiliki cara untuk mengumpulkan data untuk mengukur kinerja usahanya. Pengusaha secara disadari atau tidak melakukan sistem pencatatan, pengendalian dan mengumpulkan data pendapatan serta pengeluarannya. Patton menegaskan bahwa pencatatan (*bookkeeping*) dan akuntansi adalah hal yang tidak identik tetapi tetapi kualitas akuntansi bergantung pada kualitas *bookkeeping* (Warsono, 2019). Kualitas *bookkeeping* ini yang menentukan data kinerja dan pertanggungjawaban perusahaan.

Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah “Bagaimanakah implementasi pengendalian internal pada sistem akuntansi pendapatan dan pengeluaran kas pada usaha mikro?

3. RESEARCH METHOD

Penelitian ini berusaha mengungkapkan bagaimana cara pengusaha melakukan pengendalian internal melalui sistem akuntansi pendapatan dan pengeluaran kas perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan dengan wawancara dan pengamatan langsung. Penelitian dilakukan pada ‘LBB Surabaya’ dan ‘Travel Surabaya’. Pengumpulan data dilakukan mulai Juli 2019 sampai dengan September 2019. Wawancara dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu dengan narasumber. Tempat wawancara di luar dan di dalam kantor narasumber. Peneliti merekam dan kemudian mencatat hasil wawancara tersebut. Peneliti melakukan validasi hasil pertanyaan dengan triangulasi, yaitu mencocokkan antar pernyataan narasumber pemilik usaha, karyawannya, pengguna jasa, serta melihat bukti dokumen. Interpretasi dilakukan berdasarkan penemuan kata kunci yang sama yang dinyatakan oleh para narasumber.

4. DATA ANALYSIS AND DISCUSSION

Penelitian ini mengumpulkan informasi dari dua usaha mikro bidang jasa, yaitu : Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) ‘LBB Surabaya’ dan ‘Travel Surabaya’. ‘LBB Surabaya’ didirikan tahun 2015 oleh Bpk Ari – yang sejak mahasiswa sudah menjadi tutor les privat sehingga ia mendirikan lem-

baga bimbingan belajar sendiri. 'LBB Surabaya' awalnya hanya berfokus untuk melayani kursus belajar SD hingga SMA. Selama lima tahun dan mengamati perkembangan setiap tahunnya, LBB ini menambah layanan edukasi nya hingga kursus bahasa asing dan sempoa. Tak hanya penambahan jenis layanan yang diberikan, Awal didirikannya, 'LBB Surabaya' yang berkantor pusat di saat ini sudah membuka kantor cabang di Malang dan Sidoarjo, serta dengan terus menerima tentor-tentor baru hingga sampai dengan penelitian ini dilakukan, 'LBB Surabaya' memiliki kurang lebih 200 orang tentor. Aktivitas dan komunikasi 'LBB Surabaya' dengan para pengguna jasanya terjalin pada media sosial facebook dan instagram. Sedangkan untuk 'Travel Surabaya', didirikan dan dimiliki oleh Bapak Tri, dan memiliki lima orang pegawai tetap. 'Travel Surabaya' didirikan di tahun 2015, sampai saat ini sudah melayani jasa perjalanan, pengadaan transportasi, akomodasi sampai dokumentasi saat kegiatan perjalanan berbagai klien perusahaan, maupun komunitas.

Implementasi Pengendalian Akuntansi

Pembahasan pengendalian akuntansi pada penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : (1) lingkungan pengendalian, (2) prosedur akuntansi, dan (3) risiko dan pengendalian.

Komponen lingkungan pengendalian yang tidak dapat diabaikan adalah komite audit. Sebagaimana perusahaan mikro pada umumnya, segala pengendalian dan operasional masih penuh ditangani oleh pemilik, tidak memiliki komite audit. Transaksi utang atau pinjaman usaha juga masih atas nama pribadi pemilik, sehingga keberadaan komite audit untuk perusahaan belum diperlukan.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menggambarkan keadaan di dalam organisasi yang secara langsung dapat menciptakan pengendalian terhadap aset, catatan sampai dengan kinerja organisasi. Lingkungan Pengendalian, meliputi integritas dan nilai etis di perusahaan, komitmen karyawan dan perusahaan terhadap kompetensi sesuai dengan jabatan atau bidangnya, struktur organisasi dan tanggung jawab, berjalannya kebijakan sumber daya manusia

Nilai-nilai yang dianut oleh organisasi merupakan salah satu komponen penting dalam lingkungan pengendalian. Nilai-nilai etis dan integritas diciptakan dan dibentuk dalam

kegiatan sehari-hari. Berdasarkan wawancara, nilai *trust* menjadi kunci pada pengelolaan usaha. Setiap anggota organisasi harus dapat menjadi sosok yang dipercaya oleh pengguna jasa dan rekan kerja.

"Kepercayaan itu kuncinya, kalau kami kehilangan kepercayaan dari pihak lain kami tidak akan bisa berkembang. Jadi ya yang utama menjaga *trust* itu tadi" (Bpk Ari, pemilik 'LBB Surabaya')

"Bisnis jasa, mbak, harus bisa dipercaya. Semua karyawan di sini harus bisa menjadi yang dipercaya sama yang makai jasa kita. Kita juga kerja tim, juga harus bisa saling menjaga kepercayaan supaya semua berjalan lancar" (Bapak Tri, pemilik 'Travel Surabaya').

Salah satu tentor 'LBB Surabaya' juga menyebutkan bahwa jika ada masalah, maka ia dapat terbuka menyampaikan masalah tersebut kepada pemilik kapan pun, tidak harus menunggu saat pertemuan dengan pemilik. Demikian juga dengan pegawai di 'Travel Surabaya'. Ia menyatakan bahwa segala permasalahan dapat didiskusikan langsung dengan pemilik. Bagi para karyawan, komunikasi yang terbuka adalah dasar membangun kepercayaan satu sama lain.

Dari sudut pandang pengguna jasa, kepercayaan juga menjadi landasan berjalannya bisnis ini.

"Anak saya les di 'LBB Surabaya' sudah lebih dari tiga tahun, tidak ada masalah dengan tentornya. Jika mereka tidak bisa datang, pasti ada ganti jadwal. Tentornya juga pinter-pinter, anak saya tidak bosan. Tentornya punya komitmen, *gitu lho. Bisa dipercaya*. Kalau pembayaran juga gak repot, tinggal transfer.

Saya selalu dapat *bukti bayar*." (Ibu Rachma, pengguna jasa 'LBB Surabaya')

Menurut para narasumber, makna dapat dipercaya adalah mampu untuk memenuhi janji, atau berperilaku sesuai dengan yang dikatakan. Pada bisnis 'LBB Surabaya', orang tua mempercayakan putra-putrinya untuk mendapatkan latihan pelajaran sesuai dengan materi dan waktu yang telah disepakati di awal. Oleh karena itu, 'LBB Surabaya' menyediakan bahan-bahan belajar, mengkomunikasikan hasil belajar siswa-siswinya, melakukan konfirmasi apabila ada perubahan jadwal, merespon keluhan dan saran pelanggan. Nilai kepercayaan ini yang diyakini dapat meningkatkan jumlah siswa, bertambahnya kantor cabang, dan bertambahnya tentor. Demikian juga pada 'Travel Surabaya'.

Pihak 'Travel Surabaya' melakukan telaah awal mengenai harga dan rute sebelum menyepakati kerjasama perjalanan.

Pengamatan pada lingkungan pengendalian berupa struktur organisasi menunjukkan bahwa belum ada struktur organisasi yang tertulis. Walaupun demikian, sudah ada pembagian tugas dan wewenang. Pada 'LBB Surabaya' dan 'Travel Surabaya' semua sudah memiliki bagian administrasi yang mengurus surat menyurat, pendaftaran siswa atau kontrak kerjasama, dan bagian operasional yang bertanggungjawab pada layanan jasa, dan berhadapan langsung dengan pengguna jasa. Pekerjaan akuntansi masih dilakukan oleh pemilik, dengan bantuan Bagian Administrasi sebagai penyimpan formulir. Pemilik menentukan kriteria kompetensi calon karyawan saat perekrutan. Untuk bagian administrasi, paling tidak SMK. Para tentor di 'LBB Surabaya' juga dipilih yang bidang ilmunya relevan. Misalnya, pengajar mata pelajaran Fisika SMP direkrut dari alumni fakultas teknik, atau mahasiswa fakultas teknik tingkat akhir, atau ilmu pendidikan fisika. Para pemandu wisata di 'Travel Surabaya' direkrut dari mahasiswa dan alumni sekolah tinggi pariwisata. Sementara itu, peran akuntansi masih ditangani oleh pemilik.

Kedua usaha mikro ini sudah memiliki kebijakan sumber daya manusia yang tercantum pada kesepakatan kerja, dan disampaikan saat penerimaan karyawan. Pada 'LBB Surabaya', ada kebijakan tertulis dan jelas bahwa satu tentor berhak menangani 4-5 siswa dan lokasi siswa yang dekat dengan lokasi tentor. Apabila tentor berhalangan mengajar, maka harus melaporkan diri supaya dapat digantikan oleh tentor lainnya, atau harus melapor adanya penggantian jadwal. Ada kebijakan standar penilaian kinerja karyawan, *reward* dan *punishment* pada 'LBB Surabaya', sehingga apabila karyawan dapat melampaui target kinerja maka akan mendapatkan bonus. Komunikasi yang baik antar tentor, karyawan dengan pihak manajemen (pemilik) terjalin dengan akrab, baik dan terbuka. Pemilik menerima saran dan kritik dari karyawan. Apabila ada masalah tertentu, pemilik juga meminta pendapat ke karyawan dan tentornya sebagai bahan pertimbangan.

"Menangani lebih dari 200 tentor dan karyawan-karyawan di cabang itu kalau tidak ada SOP-nya ya sulit. *Alhamdulillah* kita sudah punya SOP untuk tentor" (Bpk Ari, pemilik 'LBB Surabaya')

Sementara itu, pada 'Travel Surabaya', ke-

bijakan SDM masih belum tertulis, walaupun sudah menjadi kesepakatan bersama. Jumlah karyawan 'Travel Surabaya' beranggotakan 5 orang karyawan tetap, dan 2-3 orang pekerja lepas (*freelance*) untuk setiap *event* yang besar dan jika dibutuhkan tenaga tambahan. Evaluasi kinerja karyawan dilakukan setiap bulan, secara santai dan serius. Komunikasi terjalin dengan tatap muka dan media *whatsapp*. Pemilik pun mengetahui siapa saja karyawan yang terlibat langsung pada setiap *event*, termasuk siapa saja pegawai *freelance*-nya.

Lingkungan pengendalian adalah komponen mendasar pada prinsip pengendalian internal menurut COSO (Romney & Steinbart, 2018). Komponen pengendalian yang inti sebenarnya adalah orang-orang yang ada di dalam organisasi itu sendiri, meliputi integritas, disiplin, nilai etis, kompetensi dan lingkungan yang melingkupinya. Di UMKM khususnya pada 'LBB Surabaya' dan 'Travel Surabaya' ini keterbukaan, rasa tanggungjawab, kesadaran bahwa mereka saling melayani, baik ke pimpinan, ke sesama rekan kerja, dan melayani pengguna jasa, serta menjaga kepercayaan satu sama lain telah menjadi dasar pengendalian berjalannya bisnis mereka.

Prosedur Akuntansi

Kedua narasumber pemilik usaha menyatakan bahwa belum ada prosedur akuntansi secara tertulis. Pencatatan keuangan berakhir pada laporan kas masuk dan kas keluar, yang dievaluasi setiap bulan oleh pemilik. Pencatatan dilakukan menggunakan basis kas. Pendapatan diakui oleh pemilik berdasarkan kas yang masuk. Pemilik berperan penuh pada keputusan kas keluar dan mengontrol arus kas. Hal ini mendukung hasil penelitian (Lussier & Sonfield, 2015), bahwa pada perusahaan mikro, pemilik lebih banyak berperan di perusahaan.

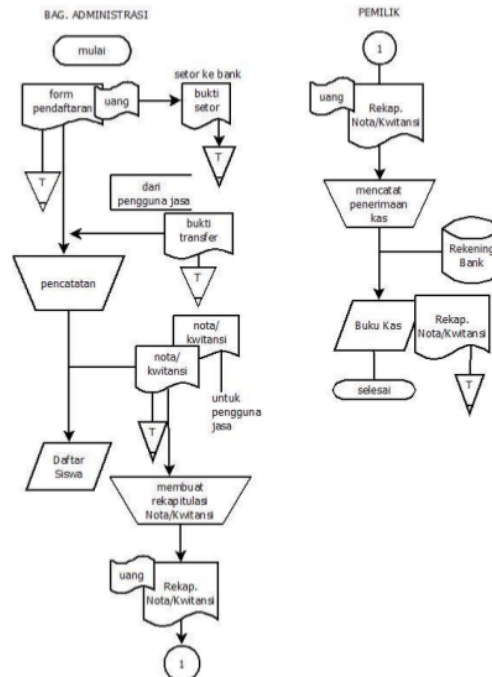
Walaupun demikian, perusahaan memiliki buku catatan piutang yang direkapitulasi setiap akhir bulan sebagai evaluasi piutang tak tertagih dan prediksi pendapatan kas bulan berikutnya. Sampai dengan penelitian ini dibuat, 'LBB Surabaya' dan 'Travel Surabaya' belum pernah mengalami piutang yang macet lebih dari 2 bulan. Nilai piutangnya pun kurang dari 1% dari total pendapatan kas. Pada 'LBB Surabaya', pembayaran jasa bimbingan dilakukan di akhir bulan, dimana batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya. Pihak manajemen 'LBB Surabaya' akan menghubungi pelanggan untuk mengingatkan jadwal pem-

bayaran. Pada 'Travel Surabaya' ada uang muka sebagai tanda jadi pengguna jasa, dan dilunasi saat pelaksanaan perjalanan. Bagaimana pun tampaknya arus kas cukup aman dan pasti diterima. Namun demikian, 'Travel Surabaya' harus melakukan riset harga sarana transportasi dan akomodasi dengan cepat dan tepat, serta konfirmasi peserta *travel* agar tidak mengalami kerugian akibat perbedaan harga yang disepakati dengan harga saat pelaksanaan.

"Yang penting sebelum *deal* sudah ada data kepastian harga untuk sewa bis, atau harga tiket, penginapan, dan yang penting juga kepastian jumlah peserta wisata. Kita pernah sudah telanjur menentukan harga sekian, sudah *deal* ternyata biaya akomodasinya naik. Wah, mau tidak mau menanggung kerugian, *gak* mungkin kita tiba-tiba menaikkan harga yang sudah disepakati sama pelanggan, kan." (Bapak Tri, pemilik 'Travel Surabaya').

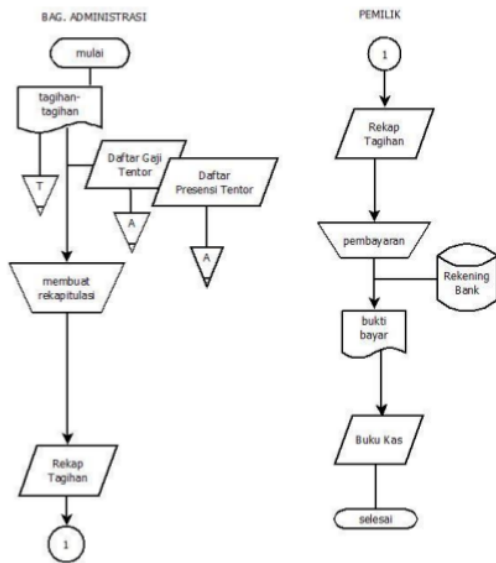
Apabila digambarkan, prosedur akuntansi pendapatan kas dan pengeluaran kas yang terjadi pada 'LBB Surabaya' tampak pada gambar 1, dan gambar 2, serta pada 'Travel Surabaya' di gambar 3 dan gambar 4 berikut.

Dari Gambar 1 diketahui bahwa bagian administrasi menyerahkan form pendaftaran untuk transaksi pendaftaran, menerima uang tunai atas pembayaran pendaftaran dan uang kursus bulanan atau menerima bukti transfer dari siswa. Bagian Administrasi mencatat pembayaran tersebut dalam Daftar Siswa. Buku Daftar Siswa berfungsi seperti Buku Pembantu Piutang yang mencatat saldo tagihan uang kursus. Setelah menerima uang atau bukti transfer, Bagian Administrasi membuat Kwitansi rangkap 2, lembar asli diserahkan ke siswa, bisa langsung atau ditiptkan kepada tentor dan rangkapnya diarsip bersama Bukti Transfer. Setiap akhir bulan Bagian Administrasi merekapitulasi total penerimaan kas tunai dan transfer dan menyerahkan berkas rekapitulasi tersebut kepada pemilik untuk dicek. Pemilik mencocokkan uang masuk tunai dan transfer dari catatan bank, kemudian mencatatnya sebagai Pendapatan Kas ke dalam Buku Kas.



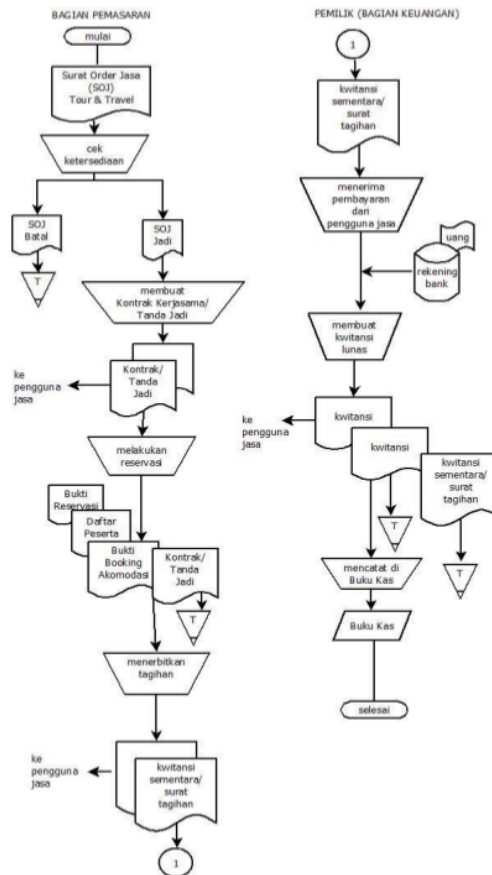
Gambar 1. Prosedur Akuntansi Pendapatan Kas pada 'LBB Surabaya'

Transaksi pengeluaran kas yang sering terjadi adalah pembayaran gaji tentor. Oleh karena itu prosedur akuntansi yang digambarkan adalah pembayaran gaji tentor. Untuk pembayaran biaya lainnya seperti iuran-iuran dilakukan dengan pembentukan kas kecil yang dipercayakan kepada Bagian Administrasi. Pembentukan kas kecil prosedurnya sama dengan pengeluaran biaya gaji, hanya nilai Kas Kecil langsung ditentukan oleh pemilik. Pada Gambar 2 Bagian Administrasi membuat rekapitulasi biaya gaji berdasarkan daftar gaji dan daftar presensi tentor. Rekapitulasi Tagihan Gaji tersebut disampaikan kepada Pemilik. Selanjutnya, pemilik membayar gaji tentor dengan cara transfer, menyimpan bukti transfer sebagai bukti bayar, dan mencatatnya dalam Buku Kas. Dengan demikian, di dalam Buku Kas tercatat Pendapatan dan Pengeluaran Kas setiap bulan.



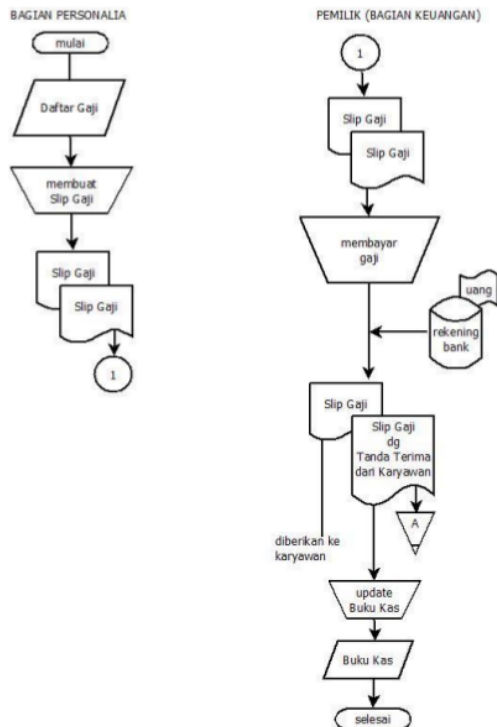
Gambar 2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas (Biaya Gaji) pada 'LBB Surabaya'

Pada Gambar 3 tampak pencatatan pendapatan dilakukan berdasarkan Kontrak Kerjasama atau Tanda Jadi. Saat Surat Order Jasa diterima, bagian Pemasaran harus sudah yakin dengan penentuan harga dan biaya yang dia buat. Apabila pekerjaan jasa travel dilanjutkan, maka diterbitkan Kontrak Kerjasama. Pengguna Jasa membayar tanda jadi dan Bagian Pemasaran membuat Kwitansi. Pemasaran mengkomunikasikan kepada Pemilik bahwa terdapat permintaan pengadaan jasa. Pemilik menerima pembayaran bisa melalui transfer atau tunai. Pemilik yang juga sebagai Bagian Keuangan kemudian membuat Kwitansi rangkap 2, lembar asli untuk pengguna jasa dan tindasannya sebagai arsip yang diarsipkan bersama dengan surat tagihan awal yang mengacu dari Kontrak Kerjasama. Pada akhir bulan, pemilik merekapitulasi arsip dan catatan bank, kemudian mencatat nilai Pendapatan Kas yang benar dalam Buku Kas.



Gambar 3. Prosedur Akuntansi Pendapatan Kas pada 'Travel Surabaya'

Akuntansi Pengeluaran Kas pada 'Travel Surabaya' disajikan di Gambar 4. Pada gambar tersebut Daftar Gaji menjadi sumber data pembayaran gaji. Daftar Gaji ini memuat besaran nilai gaji karyawan dan upah pegawai *freelance*. Bagian Administrasi yang juga merangkap menjadi Bagian Personalia membuat Slip Gaji rangkap 2 yang diserahkan ke Pemilik sebagai tagihan untuk membayarkan gaji. Selanjutnya pemilik membayarkan gaji melalui transfer untuk karyawan, dan tunai untuk *freelance*. Slip Gaji lembar ke-1 diberikan kepada penerima gaji dan lembar ke-2 ditandatangani oleh penerima gaji kemudian diarsip oleh Pemilik. Setelah pembayaran gaji tersebut, Pemilik mencatat pengeluaran kas untuk gaji pada Buku Kas.



Gambar 4. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada 'Travel Surabaya'

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemilik masih terlibat penuh pada semua transaksi. Akun bank yang digunakan berupa akun atas nama pribadi pemilik, tidak ada c/q atau tembusan nama perusahaan pada nama akun bank. Pemilik 'LBB Surabaya' dan 'Travel Surabaya' menggunakan akun bank ini sebagai bentuk pengendalian kas. Hal ini mendukung hasil penelitian Ibarra & Velasco (2015) dan Kurniawati, Nugroho, & Arifin (2012).

Semua keputusan keluar masuk kas sebagai pendapatan dan pengeluaran berada dalam kuasa penuh pemilik. Untuk pengeluaran yang nominalnya kecil, pemilik membentuk Kas Kecil yang diserahkan kepada Bagian Administrasi. Bagian Administrasi bertanggungjawab atas penggunaan Kas Kecil tersebut.

Kegiatan akuntansi yang dilakukan masih sebatas Buku Kas yang dikendalikan oleh Pemilik, dan Buku Catatan Piutang ditangani oleh Bagian Administrasi. Pada 'LBB Surabaya', Catatan Piutang ada pada Daftar Siswa yang menggambarkan daftar hadir serta tagihan dan

kas masuk dari siswa. Temuan berupa adanya Buku Catatan Piutang ini mendukung hasil penelitian (Ibarra & Velasco, 2015) bahwa bukti adanya praktik prosedur akuntansi pada UMKM adalah dilaksanakannya Buku Piutang. Sementara itu pada 'Travel Surabaya' tidak ada Catatan Piutang. Kontrak Kerjasama yang belum terlampir Kwitansi menunjukkan bahwa pekerjaan *in progress* atau belum dibayar.

Secara praktik pengendalian berkas, di 'LBB Surabaya' sudah ada formulir bernomor urut pada Kwitansi untuk Siswa. Namun di 'Travel Surabaya' belum ada nomor tercetak untuk identitas Kontrak Kerjasama dan Kwitansi, sehingga membutuhkan waktu untuk menelusuri apakah jumlah pembayaran telah sesuai dengan yang disepakati.

Risiko dan Pengendalian

Menurut prinsip COSO, organisasi harus mampu mengidentifikasi, menganalisis dan *manage* risiko. Kegiatan *manage* risiko merupakan proses yang dinamis dengan mempertimbangkan lingkungan di eksternal dan internal perusahaan (Romney & Steinbart, 2018). *Manage* risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kejadian *fraud*, mengidentifikasi adanya perubahan lingkungan, menentukan kejelasan tujuan organisasi agar dapat mengidentifikasi risiko. Setelah risiko teridentifikasi, maka perusahaan perlu menentukan bentuk pengendaliannya.

Pada 'LBB Surabaya' dan 'Travel Surabaya', pencatatan keluar masuk kas, atau Buku Kas dikendalikan penuh oleh Pemilik, dan pemilik terlibat juga pada operasional perusahaan, maka Pemilik lebih sering mengandalkan data rekening koran atau buku bank. Buku Kas terlambat diperbarui. Belum ada proses rekonsiliasi untuk mencocokkan data atau berkas yang ada dengan catatan keuangan. Selama ada saldo positif di akun bank, dan masih bisa membayar biaya-biaya, maka pemilik beranggapan bahwa usahanya masih dapat bertahan, tidak merugi. Pemilik merasa bisnisnya masih lancar. Namun demikian untuk menjawab pertanyaan berapa total pendapatan kas pada sampai dengan titik waktu tertentu, pemilik bisa menyebutkan rentang nominal dan agak kesulitan menyebutkan angka rupiah yang tepat. Begitu juga dengan jumlah biaya. Pemilik lebih mudah menggambarkan laba-rugi setiap bulannya dalam bentuk perkiraan persentase rata-rata atau dimiliki atau tidaknya dana untuk membayar gaji. Risikonya,

data akuntansi untuk laba dan rugi kurang akurat. Perusahaan akan mengalami kesulitan apabila ingin menyusun laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan.

Pada 'Travel Surabaya', Kontrak Kerjasama dan Kwitansi masih belum bernomor urut tercetak, sehingga terdapat risiko ketidakakuratan angka akuntansi pada pendapatan, apakah dicatat berdasarkan uang yang diterima atau sesuai dengan kontrak kerjasama. Apabila ada selisih nilai antara uang yang diterima dengan Kontrak Kerja, maka selisih tersebut belum tercatat.

Oleh karena keuangan dan pencatatan dikendalikan penuh oleh Pemilik, maka kebijakan Akuntansi belum ada secara tertulis. Pemilik ingin suatu hari memiliki tenaga khusus untuk akuntansi namun masih merasa belum perlu merekrut atau belum perlu menyerahkan pengelolaan keuangan dan pencatatan kepada orang lain. Namun demikian bagi pemilik hal ini masih belum menjadi masalah yang mengganggu operasional perusahaan karena laporan keuangan masih dibutuhkan untuk pemilik saja, tidak untuk pihak eksternal. Temuan ini mendukung penelitian (Kurniawati, Nugroho, & Arifin, 2012). Selama kebijakan prosedur belum jelas, dan dokumentasi keuangan yang mendukung ketersediaan sumber data masih belum terkompilasi baik, maka perangkat akuntansi berbasis teknologi komputer pun belum dapat langsung digunakan untuk menyusun laporan keuangan (Kurniawan & Diptyana, 2011; Putra, 2019).

Walaupun sudah menggunakan akun bank, penggunaan akun bank belum optimum. Penerimaan kas dari pengguna jasa masih ada yang dititipkan pada karyawan. Pada 'LBB Surabaya', masih ada siswa yang menitipkan uang pembayaran pada bagian administrasi. Pada 'Travel Surabaya' bagian penjualan juga menerima titipan pembayaran. Oleh karena pemilik menjaga konsistensi komunikasi dengan karyawan, terlibat langsung pada operasional sehari-hari, maka hal ini belum menjadi masalah. Risiko titipan uang ini adalah *lapping* atau *fraud*. Apabila risiko tersebut terjadi, maka pemilik akan bertindak tegas. Nilai keterbukaan dan memegang kepercayaan yang diberlakukan pada 'LBB Surabaya' dan 'Travel Surabaya' menjadi alat pengendalian yang utama pada risiko ini. Walaupun demikian, pemilik menyatakan sudah punya rencana untuk mengantisipasi risiko tersebut, dengan sekaligus tetap memudahkan para

pengguna jasanya.

Metode *single entry* yang diterapkan oleh 'LBB Surabaya' dan 'Travel Surabaya' mengandung risiko ketidakakuratan data akuntansi karena masih ada *cash in transit* yang belum tercatat. *Cash in transit* dapat terjadi karena ada uang dari pengguna jasa yang dititipkan ke karyawan dan belum disetor, atau cek yang belum dicairkan. Risiko tersebut dapat dikurangi dengan membuat laporan rekonsiliasi. Rekonsiliasi akun kas merupakan salah satu bentuk pengendalian internal kas yang efektif (Fatmawati & Sutarti, 2015; Mulyadi, 2016). Pemilik yang mengandalkan catatan bank sebagai data kas perlu melakukan rekonsiliasi untuk menunjukkan nilai kas yang tepat pada tanggal tertentu. Apabila perusahaan akan berkembang dan menerapkan standar akuntansi keuangan, maka perlu ditelusuri juga bahwa akun bank tidak tercampur dengan pembelanjaan pribadi pemilik. Apabila ada transaksi kas pribadi yang menggunakan akun bank perusahaan, maka perlu diperhitungkan juga dalam rekonsiliasi.

5. SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan bukti, maka disimpulkan bahwa *pertama*, pada usaha mikro bidang jasa ('LBB Surabaya' dan 'Travel Surabaya') pengendalian internal sepenuhnya dilakukan oleh pemilik atau pengelola utama. Konsep entitas belum tampak diterapkan secara penuh. *Kedua*, penggunaan akun bank telah digunakan sebagai sarana pengendalian kas, ada upaya untuk meminimumkan penerimaan kas secara tunai. *Ketiga*, belum ada rekonsiliasi yang dapat menunjukkan angka kas pendapatan dan pengeluaran yang tepat. Ada dana-dana yang dititipkan dan/atau nilai yang tidak sama antara tagihan atau kesepekatan harga jual dengan kas yang diterima belum tercatat. *Ketiga*, karena pemilik masih memiliki peran yang dominan dalam operasional, maka banyak kebijakan yang belum tertulis. Belum ada kebijakan akun dan petty cash secara tertulis, sehingga rawan inkonsistensi penulisan akun atau kategorisasi. *Keempat*, ketersediaan (*availability*) pengarsipan dan penyimpanan data perlu dievaluasi kembali agar perusahaan memiliki data yang memadai untuk melakukan rekonsiliasi. *Kelima*, walaupun data akuntansi kurang akurat, pengusaha menyatakan bahwa masih dapat menggunakan data yang ada untuk menjalankan

bisnisnya. Selama ini bisnisnya cukup lancar, dengan cara menanamkan nilai kepercayaan, dan komunikasi yang baik antara pemilik sebagai pemegang kendali, para karyawannya dan juga dengan pengguna jasa. Implikasinya, keadaan pengendalian akuntansi seperti ini dapat menyulitkan apabila perusahaan akan menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK yang berlaku. Keterbatasan penelitian ini adalah waktu wawancara dan pengamatan yang terbatas, dan beberapa dokumen tidak dapat disajikan. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggali lebih dalam mengenai implementasi pengurangan risiko pengendalian internal dan pendokumentasiannya pada perusahaan mikro dan kecil.

REFERENCES

- Clark, M. W. (1993). Entity Theory, Modern Capital Structure Theory, dan The Distinction Between Debt and Equity". *Accounting Horizon* , pp. 14-31.
- Fatmawati, M. P., & Sutarti. (2015). Retrieved November 11, 2019, from https://www.researchgate.net/profile/Sutarti_Sutarti3/publication/326998487_PENGARUH_SISTEM_AKUNTANSI_KAS_KECIL_DAN_REKONSILIASI_BANK_TERHADAP_EFEKTIVITAS_PENGENDALIAN_KAS/links/5bb43f1c299bf13e605fc23/PENGARUH-SISTEM-AKUNTANSI-KAS-KECIL-DAN-REKONSILIASI
- Ibarra, V. C., & Velasco, R. M. (2015, Vol. 7 No. 2). Accounting Knowledge, Practice and Controls of Micro, Small and Medium Enterprises: Evidence from Philippines. *Accounting and Taxation* , pp. 83 - 96.
- Kurniawan, R., & Diptyana, P. (2011, Juli Vol. 1 No. 2). Telaah Pemanfaatan Software Akuntansi Oleh Usaha Kecil dan Menengah. *The Indonesian Accounting Review* , pp. 107-116.
- Kurniawati, E. P., Nugroho, P. I., & Arifin, C. (2012, September Vol. 10, No. 2). Penerapan Akuntansi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Manajemen dan Keuangan* , pp. 1 - 10.
- Lussier, R. N., & Sonfield, M. C. (2015, Vol. 22 No. 3). "Micro" vs "Small" Family Business: A Multinational Analysis. *Journal of Small Business and Enterprises Development* , pp. 380 - 396.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ningtyas, J. D. (2017, Agustus Vol. 2 No. 1). Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM): Studi Kasus di UMKM Bintang Malam Pekalongan. *Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi* , pp. 11-17.
- Petro, K. (2016, Issue 1). Difference Between Function and Procedures in Accounting. *Institute of Accounting, Control and Analysis in The Globalization Circumstances* , pp. 15-21.
- Putra, Y. M. (2019, Vol. 2 No. 3). Analysis of Factors Affecting The Interest of SMEs Using Accounting Application. *Journal of Economics and Business* , pp. 818 - 826.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems 14th Edition*. Pearson Education.
- Sari, D. P. (2013, Agustus Vol. 4 , No. 2). Telisik Perlakuan Teori Entitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)* , pp. 188 - 197.
- Sembiring, Y., & Elisabeth, D. M. (2018, Juli - Desember Vol. 4 No. 2). Penerapan Sistem Akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Toba Samosir. *Jurnal Manajemen* , pp. 131-153.
- Warsono, S. (2019). Revisitasi Teori Double Entry Bookkeeping. In J. Hartono, A. S. Lukito-Budi, E. Nahartyo, J. A. Saputro, M. Sholihin, N. Indarti, et al., *Kajian Topik-Topik Mutakhir dan Agenda Riset Ke Depan* (pp. 91-114). Yogyakarta: Andi Offset.

Menelisik Pengendalian Akuntansi Pendapatan dan Pengeluaran Kas pada Usaha Mikro (Exploring Accounting Control for Cash Revenue and Disbursement in Micro Enterprises)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11